

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan untuk mengkaji Peraturan Perlindungan Hutan dan Penegakan Hukumnya Dalam Rangka Pengendalian Kerusakan Hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan piranti hukum di bidang kehutanan dan penegakan hukumnya, agar setiap orang atau badan hukum mematuhi dan menghormati ketentuan-ketentuan hukum di bidang kehutanan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan metode ini ditelaah dan dianalisis aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hutan, serta dikaitkan dengan penggunaan sanksi hukum administrasi dan sanksi hukum pidana sebagai instrumen penegakan hukum.

Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah secara kualitatif, kemudian ditarik simpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

Sanksi dalam hukum administrasi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi, sedangkan sanksi pidana dalam pemberlakuannya berperan pada efektivitas penegakan dan pentaatan kaidah-kaidah hukum administrasi, termasuk pada tugas-tugas pelaksanaan pemerintahan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, penerapan sanksi administratif dan pidana berkenaan dengan penegakan hukum di bidang kehutanan masih mengalami berbagai kendala baik dari segi hukum atau perundang-undangannya maupun dari segi penegak hukumnya.

KATA KUNCI:

- Perlindungan hutan
- Penegakan hukum
- Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

ABSTRACT

This research is performed in the Regency of South Sulawesi to examine Forest Conservation Regulation and Its Law Enforcement Concerned with Forest Destruction Control.

This research is intended to reveal legal instrument in forestry field and its law enforcement, so each person or corporate obeys and respects law provisions in forestry field.

This research is normative legal research, and the used approach is normative jurisdiction approach. This method studies and analysis related rule of law in line with forest conservation, as well as associated with the use of administrative law sanctions and penal sanctions as instrument of law enforcement.

The managing and analysing of the used legal material is undertaken qualitatively, then, drawn its conclusion by using deductive-inductive patterns.

The sanctions in administrative law are authoritative means which has public law feature and used by the official law as its reaction toward the disobediences to the administrative law norms. While penal sanctions, in its performance, have roles to confirm its efficiency and its obedience of the administrative law patterns, including the duties of governmental performances.

The research findings showed that the application of administrative sanctions and penal sanctions in connection with law enforcement in forestry field still experienced some difficulties either from law side or regulation, as well as law actors.

Key words: - Forest Conservation
- Law Enforcement
- Administrative Sanction and Penal Sanction